

## **KELAYAKAN KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG PALAS SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Ratih Rantini<sup>1\*</sup>**, Meyliana Lisanti<sup>2</sup>, Yayendra Mega Sucipta<sup>3</sup>, Imam Abdullah Bashir<sup>4</sup>  
Muhammad Reksa Prayudha<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pasundan, Bandung

\*Korespondensi : [ratihrantini@unpas.ac.id](mailto:ratihrantini@unpas.ac.id)

### **ABSTRAK**

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur membawa perubahan yang cukup signifikan, diantaranya adalah perubahan ibu kota. Ketika masih menjadi bagian Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan dengan ibu kotanya Tanjung Selor statusnya adalah kota administratif biasa. Namun sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bulungan harus menetapkan ibu kota baru dan pilihan jatuh pada Tanjung Palas. Kabupaten Bulungan kemudian menindaklanjuti penetapan Tanjung Palas sebagai ibu kota kabupaten melalui penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas yang disahkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas Tahun 2022 – 2042. Namun, penetapan Rencana Detail Tata Ruang tersebut tidak serta merta menjadikan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas siap menjadi ibu kota kabupaten. Hasil penelitian yang dilakukan melalui metoda deskriptif kuantitatif menggunakan variabel kelayakan suatu kota menjadi ibu kota, menunjukkan bahwa saat ini Kawasan Perkotaan Tanjung Palas belum layak untuk menjadi ibu kota kabupaten. Masih dibutuhkan banyak intervensi untuk menjadikan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan.

**Kata Kunci :** Ibu Kota, Kesiapan, Kelayakan, Tanjung Palas, Bulungan

### **ABSTRACT**

*The establishment of Provinsi Kalimantan Utara as a proliferation of Provinsi Kalimantan Timur brought quite significant changes, one of which was a change in the capital city. When it was still part of Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan with its capital city Tanjung Selor was an ordinary administrative city. However, since the establishment of Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor has been designated as the capital of Provinsi Kalimantan Utara. This caused Kabupaten Bulungan to determine a new capital city and the choice fell on Tanjung Palas. Kabupaten Bulungan then followed up on the determination of Tanjung Palas as the capital of the district through the preparation and determination of the Rencana Detail Tata Ruang for the Tanjung Palas Urban Area which was ratified in the Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas Tahun 2022 – 2042. However, the determination of the Rencana Detail Tata Ruang does not necessarily make the Tanjung Palas Urban Area ready to become the district capital. The results of research conducted using a quantitative descriptive method using the feasibility variable of a city to*

*become the capital city, indicate that currently the Tanjung Palas Urban Area is not yet feasible to become the regency capital. There are still many interventions needed to make the Tanjung Palas Urban Area able to carry out its function as the capital city of Kabupaten Bulungan.*

**Keywords :** *Capital City, Readiness, Appropriateness, Tanjung Palas, Bulungan.*

## A. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke 34 di Indonesia yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan disahkan melalui UU No. 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Yeheskel et all (2017) juga menyatakan bahwa pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Selain dari pada itu secara administratif pemerintahan, pemekaran wilayah juga bermanfaat untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.

Sebagai daerah otonomi baru, terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara tentu mendatangkan dampak positif khususnya bagi Kabupaten Bulungan dimana terletak Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Dampak positif tersebut muncul dalam bentuk pembangunan prasarana perhubungan, pembangunan prasarana produksi, dan pembangunan prasarana sosial budaya (Yeshekel et all, 2017). Namun, penetapan

Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi ternyata menimbulkan masalah tersendiri karena awalnya Tanjung Selor merupakan ibu kota Kabupaten Bulungan. Dengan demikian Kabupaten Bulungan perlu menetapkan ibu kota baru sebagai pengganti Tanjung Selor, dan berdasarkan dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2041, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menetapkan Tanjung Palas sebagai ibu kota baru Kabupaten Bulungan menggantikan Tanjung Selor.

Posisi geografis Tanjung Palas yang berbatasan langsung dengan Tanjung Selor secara normatif tentu membuat Tanjung Palas mendapatkan efek penetasan (trickle down effect) dari penetapan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi. Salah satu indikasinya adalah diarahkannya Tanjung Selor dan Tanjung Palas menjadi compact city melalui pengembangan permukiman skala besar dalam bentuk Kota Baru Mandiri (KBM) di Tanjung Selor sebagai dukungan untuk pengembangan ibu kota, baik sebagai ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten.

Ketika suatu kota ditetapkan menjadi ibu kota, biasanya kota tersebut akan mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dari perspektif kependudukan maupun ekonomi (Dascher, 2000). Ibu kota biasanya memiliki ciri kepadatan tinggi dan banyak juga merupakan tempat dimana berbagai peristiwa bersejarah baik dari aspek politik dan ekonomi terjadi (Rachmawati et all, 2021). Berabad-abad,

beberapa pemerintahan memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke daerah kurang berkembang untuk mendistribusikan pembangunan (Richard, 2019). Alasan lain pemindahan ibu kota adalah untuk menurunkan peran kota sudah terlalu besar, sehingga perlu adanya kerjasama atau pembagian kekuasaan antar wilayah untuk menghindari konsentrasi kegiatan secara geografis dan meminimalisir konflik sipil akibat ketidakmerataan pembangunan (Potter, 2017).

Namun penetapan Tanjung Selor menjadi ibu kota Kalimantan Utara di tahun 2012 sampai saat ini ternyata belum memberikan dampak positif terhadap perkembangan Tanjung Palas. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama delapan tahun terakhir sebesar  $\pm 2\%$  per tahun dan struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer dengan rantai nilai yang pendek tentu belum menunjukkan karakter Tanjung Palas sebagai sebuah kota, apalagi ibu kota kabupaten. Meskipun telah ditetapkan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas Tahun 2022 – 2042, perlu ditelaah lebih lanjut apakah memang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas telah siap menjadi ibu kota kabupaten.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variable dalam penelitian (Creswell, 2016). Sedangkan penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa, fenomena, gejala, serta kejadian yang terjadi secara faktual. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh jawaban berdasarkan kondisi faktual apakah memang Tanjung Palas sudah siap menjadi ibu kota kabupaten melalui analisis variabel-variabel yang telah ditentukan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan melalui pengumpulan data sekunder yang memiliki relevansi dengan kelayakan sebuah kota menjadi ibu kota baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun data-data yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga pemerintah. Data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan secara statistik dan spasial.

**Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kajian literatur mengenai kriteria dalam penentuan lokasi ibu kota.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Letak geografis	Jarak terhadap pusat pemerintahan lama
Kondisi fisik	Kemampuan lahan
	Potensi bencana
Ketersediaan lahan	Penggunaan lahan
	<i>Figure and Ground</i>
Kebijakan	Rencana tata ruang

Transportasi	Aksesibilitas
	Mobilitas
Tingkat Pelayanan Prasarana, Sarana, Utilitas	Fasilitas pendidikan
	Fasilitas kesehatan
	Fasilitas ekonomi
	Fasilitas sosial
	Jaringan utilitas
Kependudukan	Jumlah penduduk
	Laju Pertumbuhan penduduk
	Proyeksi Penduduk
Ekonomi	Sektor potensial

Sumber : Pratama et all (2018), Olahan Peneliti (2023)

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

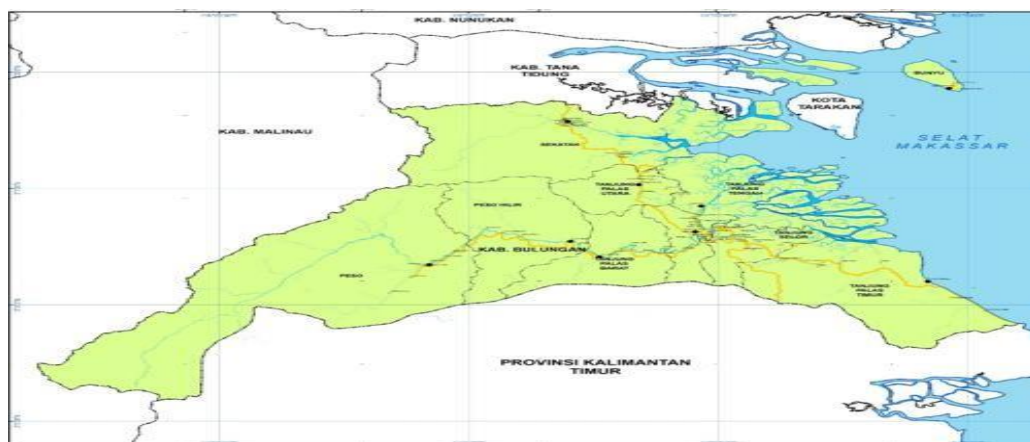
Ibu kota dari konteks konseptual memiliki arti sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan (Yahya, 2018). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka fungsi utama dari ibu kota adalah penyelenggaraan pemerintahan dimana berbagai badan atau Lembaga negara menjalankan fungsi masing-masing (Herdiana, 2020).

#### 1. Letak Geografis

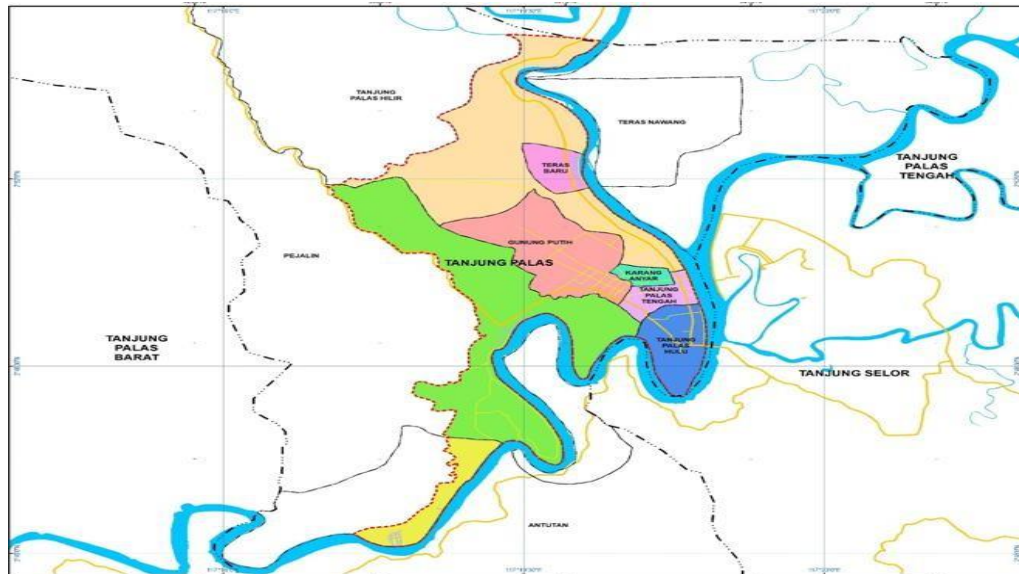
Kawasan Perkotaan Tanjung Palas memiliki luas 5.145,97 Ha yang terdiri dari delapan desa dan kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kelurahan Tanjung

Palas Hulu, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kelurahan Karang Anyar, Desa Teras Baru, Desa Pejalin, Desa Gunung Putih, dan Desa Antutan. Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan Tanjung Selor, jarak antara pusat Kecamatan Tanjung Selor dengan Tanjung Palas hanyalah 9,2 km.

Kedekatan posisi geografis ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan arahan kebijakan untuk menjadikan Tanjung Selor dan Tanjung Palas sebagai suatu sistem perkotaan dalam bentuk kota baru mandiri (KBM).



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Bulungan

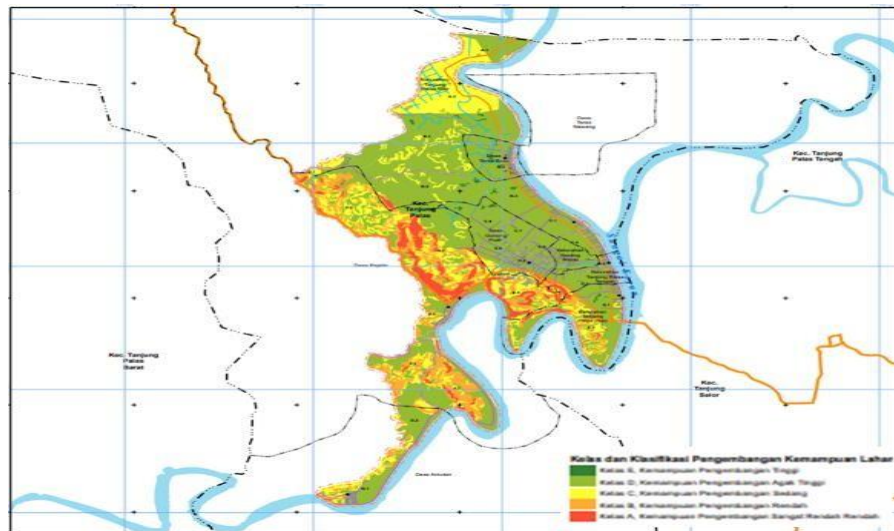


**Gambar 2** Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

## 2. Kondisi Fisik Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan yang digunakan sebagai acuan pengembangan kawasan perkotaan. Analisis ini dilakukan melalui tumpang tindih peta atau overlay kondisi fisik yang menghasilkan delapan Satuan Kemampuan Lahan (SKL), yaitu SKL Morfologi, SKL Kemudahan Dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKL Drainase, SKL Pembuangan Limbah, dan SKL Terhadap Erosi. Seluruh SKL ini kemudian kembali di-overlay dan dibobotkan sehingga menghasilkan kemampuan lahan. Cara pembobotan dan overlay ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Npmp/20/PRT/M/2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Hasil analisis menunjukkan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas terdiri dari lima kelas kemampuan lahan, yaitu kemampuan pengembangan sangat rendah, rendah, sedang, agak tinggi, dan tinggi. Dari kelima kelas kemampuan lahan tersebut, Kawasan Perkotaan Tanjung Palas didominasi oleh kemampuan lahan kelas agak tinggi dengan luas 3.204,053 Ha atau 62,34% dari total luas Kawasan Perkotaan Tanjung Palas. Hal ini berarti secara umum Kawasan Perkotaan Tanjung Palas relatif tidak memiliki masalah dalam pengembangan kawasan perkotaan jika ditinjau dari kondisi fisik. Hal yang menjadi pembatas dan perlu diperhatikan adalah beberapa lokasi memiliki satuan kemampuan lahan (SKL) morfologi tinggi, yang berarti kompleksitas morfologinya juga tinggi dan bentang alamnya berupa gunung, pegunungan, dan bergelombang. Implikasinya adalah kemampuan pengembangannya sangat rendah sehingga sulit dikembangkan dan lebih jauhnya tidak layak dikembangkan sebagai Kawasan perkotaan.

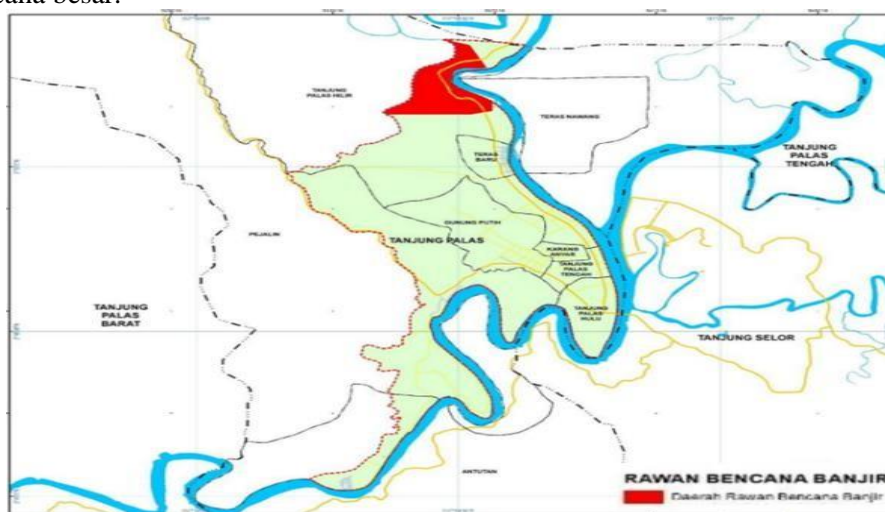


**Gambar 3** Peta Kemampuan Lahan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

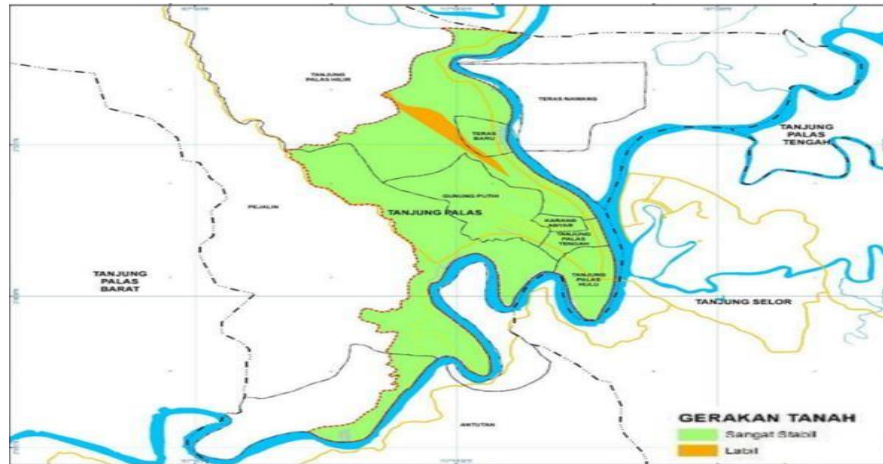
### Potensi Bencana

Salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi ibu kota adalah natural capital, yaitu kemampuan daya dukung dan kapasitas sumber daya alam, salah satunya adalah aman dari bencana (Kurniadi, 2019). Daryono (2019) juga menyatakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam pemindahan ibu kota adalah risiko dampak dari bencana kecil dan keamanan dari bencana besar.

Kawasan Perkotaan Tanjung Palas sendiri memiliki potensi bencana rawan bencana banjir dan gerakan tanah. Potensi bencana banjir terdapat di Kelurahan Tanjung Palas Hilir dengan luasan 366,48 Ha dan di sepanjang Daerah Aliran Sungai Kayan. Sedangkan untuk rawan bencana gerakan tanah terdapat di Desa Tanjung Palas Hilir seluas 136,35 Ha dan di Desa Teras Baru dengan luasan 13,64 Ha.



**Gambar 4** Peta Rawan Bencana Banjir Kawasan Perkotaan Tanjung Palas



**Gambar 5** Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

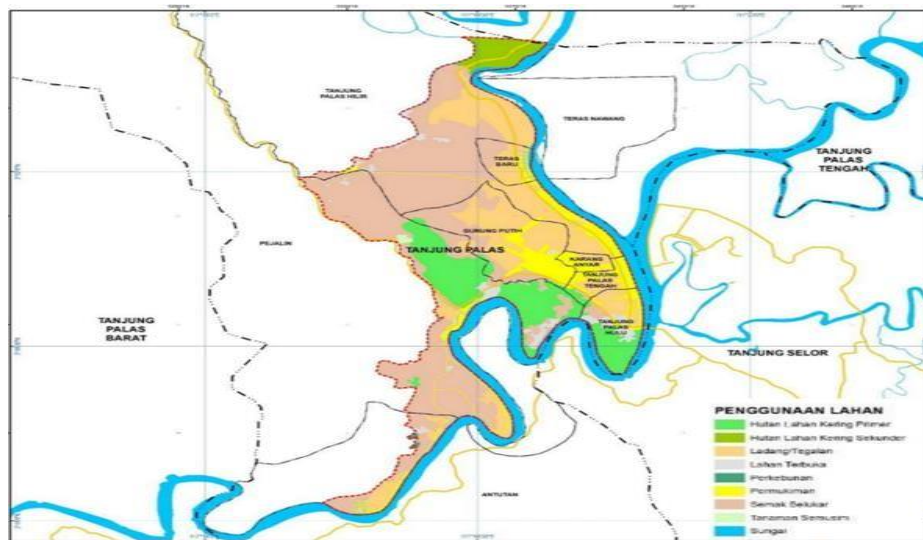
**3. Ketersediaan Lahan Penggunaan Lahan**

Berdasarkan tabel penggunaan lahan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas di bawah ini, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar semak belukar dengan luasan 2.282,72 Ha atau sekitar 44% dari total luasan. Kedua terbesar yaitu tegalan/ladang seluas 1.251,60 Ha atau sekitar 24%.

**Tabel 2** Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	679,49
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	155,72
3	Ladang/Tegalan	1.251,60
4	Lahan Terbuka	144,81
5	Perkebunan	8,12
6	Permukiman	520,08
7	Semak Belukar	2.282,72
8	Sungai	90,06
9	Tanaman Semusim	9,43
<b>TOTAL</b>		<b>5.142,02</b>

*Sumber : Olahan Peneliti, 2023*



**Gambar 6** Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

Dari tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa dari perspektif penggunaan lahan, Kawasan Perkotaan Tanjung Palas masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Pertama, lahan yang digunakan untuk kegiatan permukiman baru sekitar 10% dari total luas kawasan atau seluas 520,08 Ha. Kedua, masih terdapat fungsi lahan yang belum masuk kategori lahan produktif (semak belukar) yang justru mendominasi penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas.

Pola permukiman yang mengikuti jaringan jalan utama dan sepanjang Sungai Kayan menunjukkan saat ini penjalaran fisik kota linear (ribbon/linear/axial development). Menurut Yunus (1994), penjalaran fisik kota jenis ini menunjukkan penjalaran yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan kota karena hanya memusat mengikuti jaringan tertentu, dalam hal ini jaringan jalan dan jaringan sungai.

#### **Figure and Ground**

Salah satu upaya untuk menjaga perkembangan perencanaan kawasan yang terjadi di masa yang akan datang, perlu dilakukan analisis morfologi perubahan kepadatan kawasan terbangun (Refransisa, 2020).

Dari tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa dari perspektif penggunaan lahan, Kawasan Perkotaan Tanjung Palas masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Pertama, lahan yang digunakan untuk kegiatan permukiman baru sekitar 10% dari total luas kawasan atau seluas 520,08 Ha. Kedua, masih terdapat fungsi lahan yang setiap lingkungan perkotaan tentu akan memiliki pola tertentu yang terbentuk berdasarkan bangunan dalam lingkungan tersebut. Pola tersebut dikenal dengan pola solid (figure) dan void (ground). Analisa figure and ground merupakan analisis yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pola solid dan pola void (Monica, et all, 2014). Analisis figure and ground juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi



tekstur dan pola tata ruang perkotaan (urban fabric) dan keteraturan massa atau ruang perkotaan (Mulyandari, 2010).

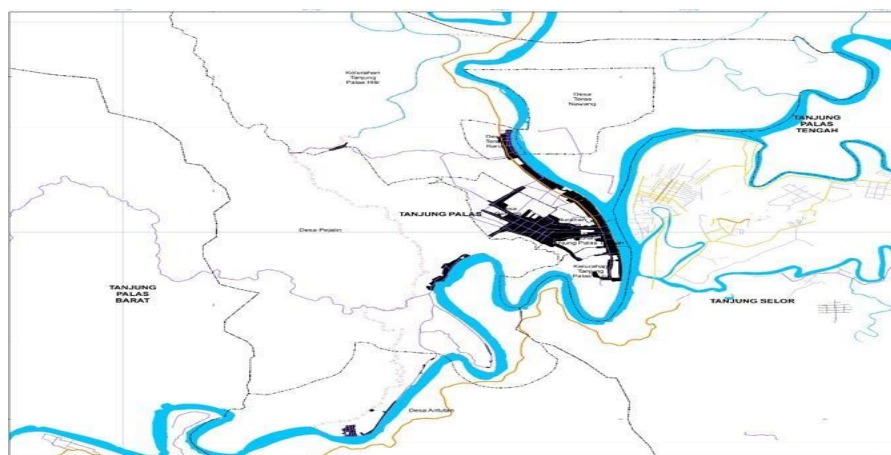
Hasil analisis figure and ground di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas masih didominasi dengan kawasan non terbangun dibanding kawasan terbangun, hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk

pemanfaatan ruang masih cukup luas untuk dikembangkan. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perkotaan di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas berdasarkan analisis figure and ground adalah seluas 4.619,56 Ha atau sekitar 89,88% dari total luas wilayah Kawasan Perkotaan Tanjung Palas.

**Tabel 3** Analisis Figure and Groud Pengembangan Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)			Persentase (%)	
		Terbangun	Non Terbangun	Total	Terbangun	Non Terbangun
1	Desa Antutan	26,66	249,07	275,73	9,67	90,33
2	Desa Gunung Putih	146,53	314,57	461,09	31,78	68,22
3	Desa Pejalín	34,53	1.788,61	1.823,14	1,89	98,11
4	Desa Teras Baru	33,18	140,55	173,73	19,10	80,90
5	Kelurahan Karang Anyar	54,61	44,58	99,18	55,06	44,94
6	Kelurahan Tanjung Palas Hilir	108,15	1.633,50	1.741,65	6,21	93,79
7	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	46,68	381,54	428,22	10,90	89,10
8	Kelurahan Tanjung Palas Tengah	69,73	67,16	136,89	50,94	49,06
	<b>WP Tj Palas</b>	<b>520,08</b>	<b>4.619,56</b>	<b>5.139,64</b>	<b>10,12</b>	<b>89,88</b>

Sumber : Olahan Peneliti, 2023



**Gambar 7** Peta Figure and Ground Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

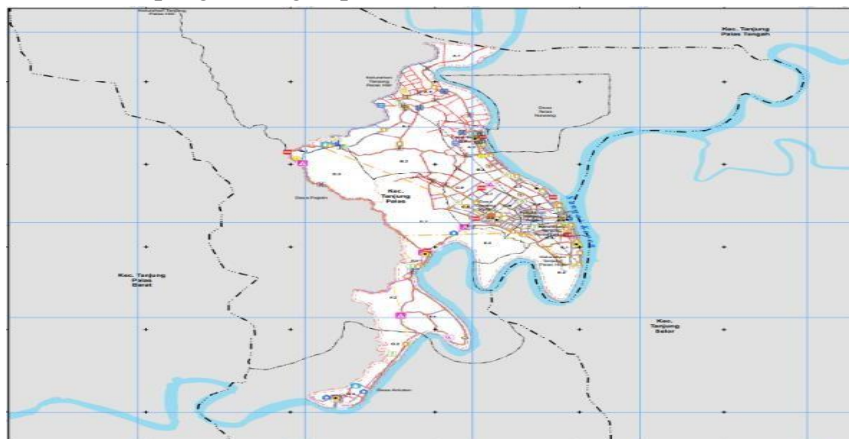
#### 4. Kebijakan

Kebijakan yang ada memang sudah mendukung Kawasan Perkotaan Tanjung Palas sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan, perlu dilihat kebijakan dari dua perspektif, yaitu kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan. Kebijakan spasial disini merujuk kepada rencana tata ruang yang telah berlaku, sedangkan kebijakan pembangunan dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan. Saat ini Kawasan Perkotaan Tanjung Palas telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disahkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas Tahun 2022-2042. Didalamnya diatur mengenai rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang menjadi arahan dalam merencanakan ruang di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas.

Struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan yang berhierarki satu dengan lainnya yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana, berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Rencana struktur ruang meliputi : (1) rencana pengembangan pusat

pelayanan ; (2) rencana jaringan transportasi ; (3) rencana jaringan energi/kelistrikan ; (4) rencana jaringan telekomunikasi ; (5) rencana jaringan air bersih ; (6) rencana jaringan air minum ; (7) rencana jaringan air limbah ; (8) rencana jaringan persampahan ; (9) rencana jaringan drainase ; (10) rencana jaringan prasarana lainnya yang terdiri dari jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan tanggul penahan longsor.

Jika dilihat dari rencana pusat pelayanan, terlihat bahwa RDTR ini sudah menuju ke arah mewujudkan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan. Hal ini terlihat dari rencana penyediaan perumahan kepadatan tinggi, pusat pengembangan perdagangan dan jasa, serta pusat pemerintahan skala kabupaten. Rencana jaringan prasarana juga sudah diarahkan untuk skala pelayanan kabupaten, baik dalam bentuk pengembangan eksisting/peningkatan kapasitas ataupun pengadaan prasarana baru yang memang belum tersedia dan dinilai penting untuk mendukung Kawasan Perkotaan Tanjung Palas menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan.



**Gambar 8** Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi peruntukan lahan dan dimuat dalam peta yang berfungsi sebagai alat bagi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum, rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas merupakan penerjemahan dari rencana pola ruang Kabupaten Bulungan. Di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas sendiri direncanakan terdapat dua zona, yaitu zona lindung dengan luas 914,61 Ha dan zona budidaya seluas 4.227,44 Ha. Lebih lengkapnya dapat disimak pada tabel dan gambar berikut.

Hasil penelitian, termasuk hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci dalam bagian ini. Ilustrasi, jika diperlukan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan/atau gambar. Tabel dan gambar harus sederhana, informatif, mudah dipahami, dan mandiri, dalam arti tabel atau gambar dimaksud harus bisa menjelaskan kepada pembaca sehingga pembaca tidak harus membaca tulisannya untuk memahaminya. Hal yang sudah dijelaskan dalam tabel atau gambar tidak perlu diulang dalam tulisan.

Hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian pada topik serupa dari peneliti sebelumnya untuk mengungkap keajegannya (konsistensinya) apakah konsisten (sama) atau berbeda, lalu jelaskan alasan ilmiahnya atas hasil dimaksud secara lugas dan tuntas sehingga memperjelas posisi hasil penelitiannya. Selanjutnya, temuan hasil penelitian diungkapkan disertai kelebihan dan kelemahannya, jika ada. Ungkapan temuan hasil penelitian ini akan mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian.

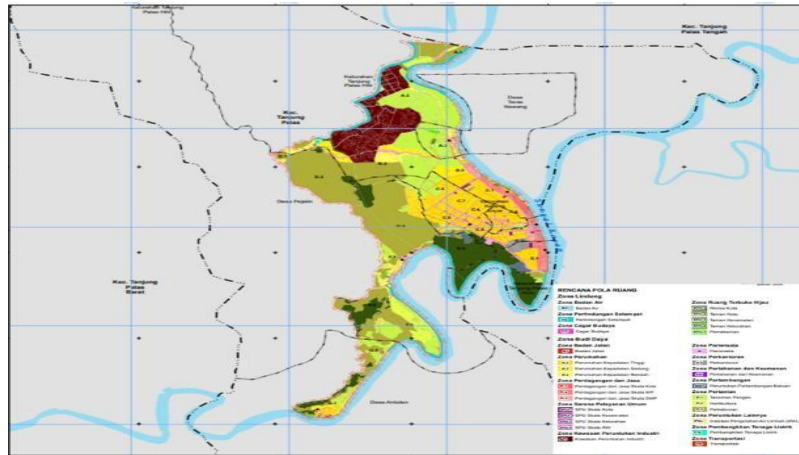
Jika dibandingkan dengan penggunaan lahan eksisting yang dibahas sebelumnya, dapat diidentifikasi perubahan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan lahannya. Terlihat bahwa rencana pola ruang berupaya membawa Tanjung Palas ke arah pengembangan perkotaan lebih jauhnya sebagai ibu kota kabupaten melalui rencana penyediaan permukiman kepadatan tinggi, penyediaan sarana prasarana dan utilitas serta perdagangan dan jasa skala kota.

**Tabel 4** Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

<b>Nama Zona</b>	<b>Nama Sub-Zona</b>	<b>Kode Sub-Zona</b>	<b>LUAS</b>
<b>ZONA LINDUNG</b>			
Zona Badan Air	Badan Air	BA	41,83
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	257,81
Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	RTH-7	7,85
	Rimba Kota	RTH-1	580,44
	Taman Kecamatan	RTH-3	3,39
	Taman Kelurahan	RTH-4	16,20
	Taman Kota	RTH-2	6,47
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	1,31
			915,30
<b>ZONA BUDIDAYA</b>			

Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	118,13
Zona Pertanian	Hortikultura	P-2	91,04
	Perkebunan	P-3	1.394,20
	Tanaman Pangan	P-1	852,84
Zona Pertambangan	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	37,94
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	2,01
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	475,03
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	4,39
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	147,32
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	131,14
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	600,08
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12,31
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6,97
	SPU Skala Kota	SPU-1	3,58
	SPU Skala RW	SPU-4	0,53
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	0,17
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	14,43
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	203,10
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	93,39
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	37,18
Zona Transportasi	Transportasi	TR	2,50
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	2,38
			4.230,67
<b>TOTAL LUASAN</b>			<b>5.145,97</b>

Sumber : Olahan Peneliti, 2023



**Gambar 9** Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

**5. Transportasi**

Analisis transportasi dilakukan untuk menciptakan kemudahan dalam pergerakan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, dan mendukung fungsi masing-masing zona. Analisis transportasi meliputi analisis sistem kegiatan, analisis sistem jaringan, dan analisis sistem pergerakan. Analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana struktur ruang.

**Tabel 5** Analisis Aksesibilitas di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Desa/Kelurahan	Aksesibilitas	
		Nilai	Kategori
1	Antutan	0,12	Rendah
2	Gunung Putih	0,06	Rendah
3	Karang Anyar	0,09	Rendah
4	Pejalin	0,05	Sangat Rendah
5	Tanjung Palas Hilir	0,05	Sangat Rendah
6	Tanjung Palas Hulu	0,07	Rendah
7	Tanjung Palas Tengah	0,04	Sangat Rendah
8	Teras Baru	0,07	Rendah
<b>Rata-Rata</b>		<b>0,06</b>	<b>Rendah</b>

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai ukuran peluang atau kemudahan individu (dalam hal ini penduduk) dalam mencapai kegiatan yang diinginkan dengan menggunakan system transportasi tertentu, dalam hal ini adalah jaringan jalan (Dirham et al, 2018). Berdasarkan hasil analisis aksesibilitas di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas secara umum dapat dikatakan termasuk kategori rendah. Secara normatif, hal ini berarti masih banyak daerah yang belum terlayani jaringan jalan sehingga tentu akan mempengaruhi kegiatan transportasi. Namun jika melihat kondisi eksisting, pergerakan penduduk di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas tidak hanya melalui jalur darat, namun juga memanfaatkan Sungai Kayan sebagai jaringan transportasi.

**Tabel 6** Analisis Mobilitas di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Desa/Kelurahan	Mobilitas	
		Nilai	Kategori
1	Antutan	0,001	Rendah
2	Gunung Putih	0,003	Sedang
3	Karang Anyar	0,004	Tinggi

4	Pejalin	0,001	Rendah
5	Tanjung Palas Hilir	0,001	Rendah
6	Tanjung Palas Hulu	0,002	Sedang
7	Tanjung Palas Tengah	0,001	Rendah
8	Teras Baru	0,002	Sedang
<b>Jumlah</b>		<b>0,002</b>	<b>Sedang</b>

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Mobilitas merupakan jumlah perjalanan yang dilakukan dan mewakili kualitas pergerakan melalui berbagai jaringan transportasi. Hasil analisis mobilitas di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas memperlihatkan bahwa indeks mobilitasnya termasuk kategori sedang. Hal ini konsisten dengan hasil analisis aksesibilitas yang menunjukkan bahwa masyarakat Kawasan Perkotaan Tanjung Palas tidak hanya mengandalkan jaringan jalan untuk melakukan kegiatan transportasi.



**Gambar 10** Pola Pergerakan Transportasi Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

#### 6. Tingkat Pelayanan Prasarana, Sarana, Utilitas

Salah satu sumber daya buatan yang menjadi modal dalam pengembangan kawasan perkotaan adalah prasarana, sarana, dan utilitas. Sebagai ibu kota, tentu Kawasan Perkotaan Tanjung Palas harus didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai dalam mendukung kegiatan

penduduknya. Namun ketersediaan saja tidak cukup, yang harus dipastikan juga adalah keterjangkauan dari prasarana, sarana, dan utilitas agar bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu analisis yang digunakan untuk melihat dukungan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengembangan kawasan perkotaan adalah tingkat pelayanan.

**Tabel 7** Tingkat Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Desa/Kelurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Ekonomi	Fasilitas Peribadatan	Jaringan Listrik
1	Antutan	50%	52%	40%	143%	123%
2	Gunung Putih	13%	82%	99%	118%	45%
3	Karang Anyar	37%	0%	46%	231%	93%
4	Pejalin	164%	26%	0%	273%	176%
5	Tanjung PalasHilir	180%	43%	81%	89%	52%
6	Tanjung PalasHulu	27%	63%	45%	56%	244%
7	Tanjung PalasTengah	91%	57%	100%	38%	170%
8	Teras Baru	0%	66%	18%	88%	100%

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi ketidakmerataan tingkat pelayanan dari seluruh jenis prasarana, sarana, dan utilitas yang diidentifikasi. Tingkat pelayanan ini didapatkan dari perbandingan antara ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, masih terdapat desa dan kelurahan di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas dimana masyarakatnya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses prasarana, sarana, dan utilitas.

#### Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan faktor strategis dalam kerangka pembangunan, karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Dengan demikian pembangunan seyogyanya dikembangkan dengan mempertimbangkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

**Tabel 8** Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Kelurahan /Desa	Penduduk (Jiwa)					LPP (%)			
		2016	2017	2018	2019	2020	16-'17	17-'18	18-'19	19-'20
1	Tanjung PalasHulu	930	1.512	1449	1485	1.558	62,58	-4,17	2,48	4,92
2	Tanjung Palas Tengah	1.015	2.483	2329	2317	2.409	144,63	-6,20	-0,52	3,97
3	Tanjung PalasHilir	3.238	3.749	3712	3839	3.963	15,78	-0,99	3,42	3,23
4	Karang Anyar	659	1.087	1078	1076	1.142	64,95	-0,83	-0,19	6,13
5	Gunung Putih	2.950	3.105	2986	3055	3.179	5,25	-3,83	2,31	4,06
6	Pejalin	1.086	1.091	1021	1077	1.130	0,46	-6,42	5,48	4,92
7	Antutan	2.018	2.445	2237	2242	2.320	21,16	-8,51	0,22	3,48
8	Teras Baru	818	1.201	890	844	869	46,82	-25,90	-5,17	2,96
<b>Jumlah</b>		<b>12.714</b>	<b>16.673</b>	<b>15.702</b>	<b>15.935</b>	<b>16.570</b>	31,14	-5,82	1,48	3,98

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

**Tabel 9** Proyeksi Penduduk Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Kelurahan / Desa	Proyeksi Penduduk (Jiwa)			
		2027	2032	2037	2042
1	Tanjung Palas Hulu	1.989	2.306	2.622	2.939
2	Tanjung Palas Tengah	3.332	3.964	4.596	5.228
3	Tanjung Palas Hilir	5.627	6.729	7.832	8.934
4	Karang Anyar	1.372	1.553	1.733	1.914
5	Gunung Putih	3.734	4.119	4.503	4.888
6	Pejalin	1.125	1.148	1.172	1.195
7	Antutan	2.611	2.809	3.007	3.205
8	Teras Baru	930	942	954	966
	Jumlah	20.271	23.571	26.420	29.269

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Dari kedua tabel diatas berdasarkan jumlah penduduk eksisting dan besaran laju pertumbuhan penduduk, terlihat bahwa saat ini Kawasan Perkotaan Tanjung Palas belum dapat dikatakan sebagai kota. Klasifikasi kota paling rendah yaitu kota kecil, memiliki jumlah penduduk antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Ketika diproyeksikan berdasarkan lajupertumbuhan penduduk alami, di tahun 2027 barulah Tanjung Palas dapat dikategorikan sebagai kota kecil.

### 7. Ekonomi Potensial

Struktur ekonomi Kawasan Perkotaan Tanjung Palas masih didominasi oleh struktur ekonomi primer. Hal ini terlihat dari tabel dibawah yang menunjukkan komoditas potensial yang terdapat di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas yang diidentifikasi berdasarkan economic base seluruhnya berasal dari sektor pertanian.

**Tabel 10** Komoditas Potensial Kawasan Perkotaan Tanjung Palas

No	Komoditas	Nilai LQ
1	Padi sawah	1,05
2	Kopi	7,17
3	Kakao	5,41
4	Bawang merah	4,93
5	Kubis	16,23
6	Jahe	3,25
7	Durian	2,15
8	Pepaya	2,01

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai variabel yang harus diperitmbangkan dalam memilih ibu kota baru, terlihat bahwa Kawasan Perkotaan Tanjung Palas saat ini belum layak menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan. Meskipun telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang yang telah memiliki kekuatan hukum sebagai arahan pengembangan kawasan, namun perlu beberapa instrumen kebijakan lain agar Kawasan Perkotaan Tanjung Palas



bisa berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan.

Salah satu pilar dalam pengembangan kawasan perkotaan adalah penduduk. Mengingat laju pertumbuhan penduduk alami yang hanya berkisar di angka 3% per tahun, perlu kebijakan ekstrim agar Kawasan Perkotaan Tanjung Palas memiliki cukup penduduk untuk menjadi sebuah kota. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah merencanakan pusat pertumbuhan skala besar yang dapat menjadi daya tarik bagi penduduk di luar Tanjung Palas untuk datang dan bermukim di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas. Dengan kata lain.

Diharapkan dengan bertambahnya penduduk di Kawasan Perkotaan Tanjung Palas, hal ini akan menjadi leverage bagi perkembangan sektor lain. Semakin heterogen penduduk kota maka sektor ekonomi yang berkembang juga mengalami diversifikasi, tidak hanya mengandalkan sektor primer, dan rantai nilai dari setiap komoditas juga bertambah panjang. Pertambahan penduduk juga akan membangkitkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas skala besar untuk meningkatkan tingkat pelayanan, Dari segi fisik dan penggunaan lahan, Kawasan Perkotaan Tanjung Palas relatif tidak memiliki masalah dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Namun, perlu dicermati beberapa dampak negatif yang mungkin timbul dari perkembangan agresif suatu kota, salah satunya adalah urbanisasi. Dari fenomena urbanisasi yang cepat di Kuala Lumpur dan Rangun mengakibatkan kebutuhan lahan yang luas untuk ruang hidup dan aktivitas. Itu mengarahkan berkurangnya ketersediaan lahan dan di sisi lain memperketat persaingan untuk

mendapatkan lahan yang tersisa sehingga menaikkan harganya (Wahi et all, 2018 ; Sabrie, M. 2019). Kelangkaan lahan juga memaksa Warga Kuala Lumpur dan Rangun mencari tanah tersebut keluar kawasan perkotaan, menyebabkan urban sprawl. Urban sprawl akan menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya sebagai dampak dari penggunaan transportasi yang lebih tinggi dan hilangnya vegetasi (Naeema, 2019). Di Rangun, pertumbuhan kota mengikuti pola multisentral dan terus memperluas kawasan perkotaan tanpa menyiapkan kebijakan tegas mengenai persaingan lahan (Sabrie, M. 2019 ; Naeema, 2016 ; Sritarapipat T & Takeuchi W, 2016)]. Sebagai dampaknya, terjadi gentrifikasi dan marginalisasi yang menyebabkan kumuh dan penurunan kualitas hidup penduduk (Metleski, M, M. Sabrie, 2019).

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- A. Potter. 2017. *Locating the Government: Capital Cities and Civil Conflict*, Research and Politics, 4, 4.
- Dascher, K.. 2000. *Are Politics and Geography Related?: Evidence from a Cross-section of Capital Cities*. *Public Choice*, 105, 373-392. <https://doi.org/10.1023/A:1005151611464>
- Herdiana, Dian. 2020. *Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara*. *Politica* Vol. 11 No.1. doi: 10.22212/jp.v11i1.1382
- Kurniadi, Anwar. 2019. *Pemilihan Ibu kota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan*. *Jurnal Manajemen Bencana*. Volume 5, No.2, 1-12.

- doi:10.331.72/jmb.v5i2.458.
- Monica, Latu Melati et all. 2014. Perkembangan Kawasan Pecinan Semarang. *Jurnal Komposisi*, Volume 10 Nomor 6, pp. 361-373.
- M. Sabrié. 2019. Yangon “Emerging Metropolis”: Challenges for the Authorities and Resilience of the Yangonites. *Moussons: Recherche en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est*, 33.
- M. Matelski, M. Sabrié. 2019. Challenges and Resilience in Myanmar's Urbanization: A Special Issue on Yangon. *Moussons: Recherche en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est*, 33.
- Pratama, Iman Tunas et all. 2018. Penentuan Alternatif Lokasi Ibu kota Kabupaten Mojokerti berdasarkan Stakeholder. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*. Volume 10, Nomor 1.
- Refranisa. 2020. Analisa Figure Ground pada Kawasan Pecinan Kota Magelang. *TECHNOPEX-2020 Institut Teknologi Indonsia/ ISSN : 2654-489X*
- Yahya, H.M. 2018. Pemandangan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14. No. 1 : 21-30.
- Yeheskel et all. 2017. Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembangunan Fisik di Kabupaten Bulungan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 4 :1483-1496.
- Mulyandari, Hesti. 2010. Pengantar Arsitektur Kota. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rachmawati et al. 2021. Best Practices of Capital City Relocation in Various Countries : Literature Review. *E3S Web Conferences* 325,07004 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132507004>
- Dirham, Rahmat et all. 2018. Aksesibilitas dan Mobilitas Jaringan Jalan dalam Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Mimika. *Prosiding Somposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-21 Universitas Brawijaya*, Malang, 19-20 Oktober 2018
- N. Wahi, R. M. Zin, V. Munikanan, I. Mohamad, S. Junaini. 2018. Problems and Issues of High Rise Low Cost Housing in Malaysia. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 341
- T. Sritarapipat, W. Takeuchi. 2016. Modeling urban expansion in Yangon, Myanmar using Landsat time series and stereo GeoEye Images. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 37 *Karya Ilmiah Lepas*
- Richard, Katherine Schulz. Capital City Relocation. accessed from <https://www.thoughtco.com/capital-city-relocation-1435389> on May 18th 2023 Laporan pada Pertemuan Ilmiah yang Tidak Tercakup dalam Buku atau Prosiding.
- Daryono. (2019). Rencana Pindah Ibu kota Negara Ditinjau dari Aspek Potensi Gempa, Tsunami, dan Iklim. Materi FGD Fakultas Kamnas Universitas Pertahanan Tanggal 16 Juli 2019. Bogor: Universitas Pertahanan
- M. A. Naeema. 2016. Malaysia Sustainable Cities Program, Working Paper Series (2016)